

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DALAM
LAPORAN TAHUNAN**

Suriana, SE, M. Acc

Dosen Fakultas Ekonomi UNIVA MEDAN

NIDN : 0124048305

Email : suriana7771@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan. Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional. Pengukuran tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan didasarkan pada Indeks GRI. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di PROPER dan BEI tahun 2013, 2014, dan 2015. Total sampel penelitian adalah 90 laporan tahunan perusahaan yang dipilih secara *purposive sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Namun, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

Kata kunci : GRI, pengungkapan tanggung jawab lingkungan, struktur kepemilikan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan yang terjadi sangat merugikan masyarakat. Kondisi ini yang menimbulkan keresahan masyarakat terhadap kepedulian perusahaan yang kurang terhadap lingkungan. Handayani (dalam Wijayanti, 2012) menyatakan bahwa permasalahan lingkungan adalah faktor penting yang harus dipikirkan karena pengelolaan lingkungan yang buruk juga terkait dengan berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti pencemaran air karena limbah industri, banjir dan tanah longsor yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, kasus PT Freeport di Irian Jaya, serta banjir lumpur di Sidoarjo, yang sampai sekarang belum tertangani dengan baik.

Maka pelaporan mengenai aktivitas lingkungan dalam perusahaan perlu diungkapkan. Menurut Sadjirto (dalam Amirawati, 2012), laporan mengenai aktivitas lingkungan merupakan salah satu jenis informasi non-keuangan, namun sangat penting peranannya bagi organisasi. Bagi perusahaan, laporan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan dan dianggap sebagai suatu langkah positif bagi investor maupun *stakeholders* terutama berkaitan dengan image perusahaan. Almilia (2010) menyatakan bahwa pemahaman investor tentang informasi atau pengungkapan apa saja yang disajikan perusahaan merupakan informasi penting bagi investor dalam melakukan pengambilan keputusan.

Dalam pengungkapan aktivitas lingkungan pemerintah berperan aktif melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) dengan Peraturan Bapepam –LK Nomor : X.K.6 lampiran keputusan Nomor : Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 66 bahwa laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pasal 74 ayat (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran, pasal 74 ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal 74 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.05 tahun 2011 pasal 1 bahwa program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam lingkungan yang selanjutnya disebut PROPER adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.05 tahun 2011 pasal 2 ayat (1) PROPER merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan. Pasal 2 ayat (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan PROPER. Pasal 2 ayat (3) Pemberian PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengungkapan tanggung jawab lingkungan oleh Wijayanti (2012), Sudarno (2004), Suratno, Darsono, Mutmainah (2007) dan Lindrianasari (2007) menunjukkan hasil yang positif pada *environmental performance*, ukuran perusahaan, kinerja ekonomi, status permodalan dan sektor industri. Sedangkan penelitian Hariyanto (2009) dan Suhardjanto dan Miranti (2009) bahwa profitabilitas, dan tipe industri menunjukkan hasil yang positif.

Struktur kepemilikan pada penelitian ini terdiri dari kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional karena kepemilikan saham perusahaan mendorong manajemen untuk menekankan pentingnya analisis perilaku perusahaan dengan memperhatikan lingkungan yang diharapkan agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan teori legitimasi dan peraturan pemerintah. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di PROPER dan BEI periode 2013-2015. Peneliti memilih perusahaan yang terdaftar di PROPER sebagai obyek penelitian karena PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap tingkat

- pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan?
- b. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan?
 - c. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan?
 - d. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Stakeholder

Istilah *stakeholder* dari definisi Gray et al (dalam Iryanie, 2009) menyatakan bahwa *stakeholders* adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, para *stakeholder* antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, *supplier*, pasar modal dan lain-lain.

Kasali dalam Wibisono (2007) membagi *stakeholder* menjadi sebagai berikut:

- a. *Stakeholders* Internal dan *stakeholders* eksternal

Stakeholders internal adalah *stakeholders* yang didalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada diluar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok *sosial responsible investor*, *licensing partner* dan lain-lain.

- b. *Stakeholders* primer, sekunder dan marjinal

Tidak semua elemen dalam *stakeholders* perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. *Stakeholder* yang paling disebut *stakeholders* primer, *stakeholders* yang kurang penting disebut *stakeholders* sekunder dan yang biasa diabaikan disebut *stakeholders* marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah dari waktu-waktu.

c. *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai *stakeholders* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial.

d. *Proponents, apponents, dan uncommitted*

Diantara *stakeholders* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan ada yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Organisasi perlu mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.

e. *Silent majority dan vokal minority*

Dilihat dari aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara *silent* (pasif).

2.2. Struktur Kepemilikan

Struktur Kepemilikan adalah perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah yang dimiliki oleh investor (Jahera dan Aurburn dalam Indrayani, 2009). Struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang (Ituriaga dan Sanz dalam Faizal, 2004 dalam Kristanto, 2010) yaitu:

a. Pendekatan keagenan

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

b. Pendekatan informasi asimetri

Struktur kepemilikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider dan outsider melalui pengungkapan informasi.

2.3. Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan (PROPER)

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.05 tahun 2011 pasal 1 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian dari PROPER, yaitu :

PROPER adalah pengelolaan lingkungan hidup terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Tujuan penerapan instrumen PROPER adalah untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

2.3.1. Tanggung Jawab Lingkungan

Saat ini, dampak degradasi lingkungan secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga informasi mengenai tanggung jawab lingkungan hendaknya menjadi perhatian bersama demi terwujudnya lingkungan yang ramah (*green environmental*) dan dipenuhinya kebutuhan masyarakat oleh perusahaan yang ramah pula (*green companies*) (Handayani dalam Wijayanti, 2012). Dunlap dan Scarce (dalam Lindrianasari, 2007) menyatakan bahwa dari hasil polling, publik memandang kegiatan bisnis dan perusahaan sebagai kontributor terbesar terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini.

2.3.2. Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*)

Menurut Winarno (2007) akuntansi lingkungan *environmental accounting* atau EA adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak (*impact*) baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan.

Lindrianasari (2007) menyatakan akuntansi lingkungan juga dapat dianalogikan sebagai suatu kerangka kerja pengukuran yang kuantitatif terhadap kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan perusahaan.

2.3.3. Pengungkapan Tanggung Jawab lingkungan (*Environmental Reponsibility Disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan/berkepentingan (*stakeholder*) (Wijayanti, 2012). Menurut Sudarno (2004:3) perusahaan perlu mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan, baik dalam kriteria keuangan maupun non keuangan. Pengungkapan keuangan bisa berupa pengorbanan yang ditanggung perusahaan ataupun masyarakat terkait tanggung jawab lingkungan atas aktivitas

perusahaan. Sedangkan, pengungkapan non keuangan berupa kegiatan yang telah atau yang akan dilaksanakan terkait masalah lingkungan.

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₁ : Kepemilikan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

H₂ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

H₃ : Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan

H₄ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 dengan mengakses situs www.idx.co.id dan masuk dalam kriteria penilaian PROPER periode 2012-2013, 2013-2014 dan 2014-2015 dengan mengakses situs www.proper.menlh.go.id. Sumber lain yang mendukung penelitian ini melalui kajian literatur/studi pustaka berupa jurnal, artikel, buku dan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.1. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

Berdasarkan telah daftar pustaka dan perumusan hipotesis, maka variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

Variabel Independen

Variabel independen/bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 1999:63). Penelitian ini variabel independennya adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham pemerintah Indonesia. Besarnya saham pemerintah diukur dari rasio dari jumlah kepemilikan saham pemerintah terhadap total saham perusahaan. Metode pengukuran diatas berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh Amran dan Devi (dalam Diba, 2012).

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemilik atau pemegang saham perusahaan (Faizal, 2004). Pengukuran pengaruh kepemilikan manajemen terhadap pertanggungjawaban lingkungan menggunakan presentase saham yang dimiliki manajemen. Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rumus : (Dwi K., 2012)

$$MO = \frac{\text{Saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total Jumlah saham}}$$

3. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham pihak/entitas asing (luar negeri). Besarnya saham pihak/entitas asing diukur dari rasio dari jumlah kepemilikan saham asing terhadap total saham perusahaan. Metode pengukuran diatas berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh Amran dan Devi (dalam Diba, 2012).

4. Kepemilikan Institusional

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham (Murwaningsari, 2009). Proporsi kepemilikan Institusional diukur berdasarkan persentase kepemilikannya yaitu jumlah saham institusional terhadap jumlah saham yang beredar (Murwaningsari, 2009).

Variabel Dependen

Variabel dependen yang diukur pada penelitian ini adalah tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan yang informasinya diperoleh dari data laporan tahunan. Selain itu indikator pengukuran tanggung jawab lingkungan membutuhkan *checklist* yang berisi *item- item* pengungkapan yang akan dicocokkan dengan pengungkapan dalam laporan tahunan.

Penilaian dan pelaporan tanggung jawab lingkungan dalam wacana akuntansi global dikenal dengan GRI/*Global Reporting Initiative*. Menurut Suhardjanto, Tower, dan Brown (dalam Wijayanti, 2012), GRI sebagai wacana pelaporan lingkungan untuk entitas dan *stakeholder* sebagai kontribusi perusahaan yang berkelanjutan. Bahkan dalam penelitiannya IER*indeks* yang

mengacu pada GRI dianggap lebih tepat untuk mengimplemetasikan pelaporan lingkungan di Indonesia. Dalam penelitian ini GRI digunakan sebagai proksi pengungkapan lingkungan yang meliputi 9 aspek yaitu material, energi, air, biodiversitas, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi dan keseluruhan dengan 30 *item* indikator.

Tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dilakukan dengan cara sebagai berikut (Wijayanti, 2012) :

1. Memberi skor atau angka (1) untuk perusahaan yang telah melakukan pengungkapan lingkungan sesuai dengan *item-item* tersebut, sedangkan angka (0) diberikan bagi perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan
2. Skor yang diperoleh setiap perusahaan akan dijumlahkan untuk mendapat skor total
3. Menghitung tingkat pengungkapan lingkungan setiap perusahaan dengan cara membagi total skor yang diungkapkan dengan total skor GRI indeks, yakni :

$$TJL = \frac{\text{Total Skor yang digunakan}}{\text{Total skor GRI Indeks}}$$

3.2. Metode Analisis Data

Selain menggunakan analisis deskriptif, juga dilakukan uji asumsi klasik pada penelitian ini yang meliputi; uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$TJL = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

TJL : Tingkat Pengungkapan tanggung jawab lingkungan

a : Konstanta

b₁-b₄ : Koefisien Regresi

X₁ : Kepemilikan Pemerintah

- X₂ : Kepemilikan Manajerial
X₃ : Kepemilikan Asing
X₄ : Kepemilikan Institusional
e : Kesalahan Regresi

3.4. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005:83). Bila terdapat nilai *adjusted R²* bernilai negatif, maka nilai *adjusted R²* dianggap bernilai nol.

3.5. Uji Hipotesis

3.5.1. Uji F

Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk melihat kelayakan model regresi. Model regresi dikatakan layak digunakan ketika nilai signifikan pada tabel Anova bernilai < 0,05.

3.5.2. Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk melihat apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Data

4.1.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999:170). Pada penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sebanyak 90 sampel laporan tahunan selama tiga tahun yakni periode 2009-2011. Hasil deskriptif pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
Y	0,033	0,500	0,23098	0,11459
X1	0,000	0,9003	0,06867	0,21345
X2	0,000	0,2500	0,00586	0,03066
X3	0,000	0,9632	0,29449	0,31779
X4	0,000	0,9720	0,33457	0,27034

Keteangan :

Y : TJL

X1: Kepemilikan Pemerintah

X2: Kepemilikan Manajerial

X3: Kepemilikan Asing

X4 : Kepemilikan Institusional

4.1.2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan gambar uji normalitas diketahui bahwa data/titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diolah menunjukkan pola distribusi normal sehingga disimpulkan uji normalitas telah terpenuhi dan layak dipakai dalam memprediksi besarnya pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,955	1,047	Tidak ada multikolinieritas
X2	0,991	1,009	Tidak ada multikolinieritas
X3	0,882	1,134	Tidak ada multikolinieritas
X4	0,858	1,165	Tidak ada multikolinieritas

Berdasarkan hasil tabel yakni dari perhitungan nilai tolerance menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang kurang dari 0,10 sehingga

tidak ada korelasi antar variabel bebasnya yang nilainya lebih dari 95%. Selain itu berdasarkan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonirietas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Hasil uji Durbin-Watson yang dilakukan didapatkan nilai sebesar 1,862 (lampiran 5). Berdasarkan uji autokorelasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa model empiris yang dibangun telah memenuhi asumsi berdasarkan kriteria, yaitu tidak ada autokorelasi jika $d_u < d < 4-d_u$ atau $1,751 < 1,862 < 2,249$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi sehingga uji autokorelasi telah terpenuhi.

4.2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan pada perusahaan yang terdaftar di PROPER dan BEI periode 2009-2011. Hasil uji regresi linier berganda, yakni sebagai berikut:

Table 4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Tidak Terstandarisasi		Koefisien Terstandarisasi	T Hitung	Sig.	Hipotesis
	B	Std. Error	Beta			
Konstanta	0,145	0,022		6,628	0,000	
X1	0,240	0,049	0,447	4,926	0,000	H1 diterima
X2	0,188	0,333	0,050	0,564	0,575	H2 ditolak
X3	0,120	0,034	0,333	3,521	0,001	H3 diterima
X4	0,099	0,041	0,234	2,438	0,017	H4 diterima
			R	=		0,575
			<i>Adjusted R²</i>	=		0,299
			<i>R Square</i>	=		0,330
			<i>Standar Error of estimate</i>	=		0,095
			Fhitung	=		10,473
			Fsig	=		0
			N	=		90

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,145 + 0,240X_1 + 0,188X_2 + 0,120X_3 + 0,099 X_4$$

4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan data (tabel 4.5) diketahui bahwa besarnya *adjusted R*² adalah 0,299. Hal ini berarti 29,9% variasi variabel dependen yakni tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dapat dijelaskan oleh variabel independennya meliputi kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional. Sisanya (100%-29,9%=70,1%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti dalam penelitian ini.

4.3.1. Uji F

Berdasarkan hasil uji F (tabel 4.5) didapat hasil yaitu, tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga semua variabel bebas yakni kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel terikat yaitu tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Pada uji kelayakan model ini didapatkan bahwa model persamaan regresi tersebut telah layak diuji dan dinyatakan baik.

4.3.2 Uji t

Berdasarkan hasil analisis uji t pada tabel 4.5 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Variabel kepemilikan pemerintah (X1) memiliki nilai t sebesar 4,926 dan nilai sig $0,000 < 0,05$ dengan koefisien 0,240. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga kepemilikan pemerintah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL).
- b. Variabel kepemilikan manajerial (X2) memiliki nilai t sebesar 0,564 dan sig $0,575 > 0,05$ dengan koefisien 0,188. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_2 ditolak sehingga kepemilikan manajerial secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL).
- c. Variabel kepemilikan asing (X3) memiliki nilai t sebesar 3,521 dan sig $0,001 < 0,05$ dengan koefisien 0,120. Ini berarti variabel kepemilikan asing signifikan dan berarah koefisien positif. Hal ini berarti H_0 ditolak H_3 diterima sehingga kepemilikan asing secara statistik berpengaruh positif

dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL).

- d. Variabel kepemilikan institusional (X4) memiliki nilai t sebesar 2,438 dan sig $0,017 < 0,05$ dengan koefisien 0,099. Hal ini berarti H_0 ditolak H_4 diterima sehingga kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL).

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Dalam penelitian ini struktur kepemilikan pemerintah diukur dari jumlah saham kepemilikan pemerintah terhadap total saham perusahaan. Hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa H_1 diterima yang menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL) dengan besar probabilitas 0,000 atau lebih kecil dari *level of significance* 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan koefisien 0,240. Secara statistik nilai koefisien beta positif menunjukkan adanya pengaruh searah yang berarti semakin tinggi kepemilikan pemerintah semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Menurut Dwi K.(2012) Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah. Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan pemerintah akan lebih sensitif secara politik karena kegiatan-kegiatan pemerintah akan lebih diperhatikan publik. Pemerintah berkepentingan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku agar kepentingan masyarakat secara umum tidak terganggu (Satyo dalam Suaryana, 2010).

Selain itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan Undang - Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya peraturan dari pemerintah maka perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah akan mendorong perusahaan melakukan dan melaporkan tanggung jawab lingkungan karena telah diatur oleh undang-undang.

4.4.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Dalam penelitian ini struktur kepemilikan manajerial diukur dari jumlah saham kepemilikan manajerial terhadap total saham manajerial. Hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa H_2 ditolak yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL) dengan besar probabilitas 0,575 atau lebih besar dari *level of significance* 0,05 ($0,575 > 0,05$) dan koefisien 0,188. Dalam penelitian sebelumnya tidak ada yang melakukan penelitian mengenai kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan, tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian Hapsoro (2007) bahwa proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela dan ketidaktaatan pengungkapan wajib. Berdasarkan hasil signifikan bahwa perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh manajemen kurang memiliki kontribusi terhadap tingkat pengungkapan tanggung lingkungan. Hal ini di karenakan tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yang lain.

4.4.3. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Dalam penelitian ini struktur kepemilikan asing diukur dari jumlah saham kepemilikan asing terhadap total saham asing. Hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa H_3 diterima yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing secara statistik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL) dengan besar probabilitas 0,001 atau lebih kecil dari *level of significance* 0,05 ($0,001 < 0,05$) dan koefisien 0,120. Secara statistik nilai koefisien beta positif menunjukkan adanya pengaruh searah yang berarti semakin tinggi kepemilikan asing semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Karim, Lacina dan Rutledge (dalam Chairi, 2008) bahwa kepemilikan

asing yang tinggi cenderung memiliki pengungkapan lingkungan lebih rendah. Karena perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan asing yang lebih tinggi lebih tertutup pada informasi pengungkapan lingkungan karena berada dibawah penyelidikan yang lebih cermat dari negara lain dan komunitas internasional (Karim, Lacina dan Rutledge, 2006).

4.4.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa H_4 diterima yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan (TJL) dengan besar probabilitas 0,017 atau lebih kecil dari *level of significance* 0,05 ($0,017 < 0,05$) dan koefisien 0,099. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Karim, Lacina dan Rutledge (dalam Chairi, 2008) bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder*, menurut Ghazali dan Chariri (dalam Iryanie, 2009) teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan pemerintah semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan, karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan Undang - Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 74 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik perseroan sendiri, komunitas setempat,

maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya (Ghozali dan Chairir dalam Iryanie, 2009).

- b. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Dalam penelitian sebelumnya tidak ada yang melakukan penelitian mengenai kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan, tetapi penelitian ini sesuai dengan penelitian Hapsoro (2007) bahwa proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela dan ketidaktaatan pengungkapan wajib. Berdasarkan hasil signifikan bahwa perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh manajemen kurang memiliki kontribusi terhadap tingkat pengungkapan tanggung lingkungan. Hal ini di karenakan tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yang lain.
- c. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepemilikan asing secara statistik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Karim, Lacina dan Rutledge (dalam Chairi, 2008) bahwa kepemilikan asing yang tinggi cenderung memiliki pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Cormier, Magnan dan Van Velthoven (dalam Chariri, 2008) bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Oleh karena itu semakin tinggi kepemilikan asing semakin tinggi pula pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.
- d. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian Karim, Lacina dan Rutledge (dalam Chairi, 2008) bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L. S dan Retrinasari, I. (2007). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEJ. *Proceeding Seminar Nasional*.
- Almilia, L.S. 2010. Pengaruh Order Effect dan Pola Pengungkapan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto*.
- Amirawati, D.A.R. 2012. *Analisis Pengungkapan Lingkungan Pada pemerintah daerah indonesia*. Skripsi. Jember : Universitas Jember.
- Badjuri, Achmad. 2011. Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Perusahaan Manufaktur Dan Sumber Daya Alam Di Indonesia Corporate Governance Mechanism, Fundamental Factors, Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Of A Natural Resource And Manufactur Company In Indonesian. *Vol.3, No.1*.
- Bapepam dan LK. 2008. *Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 tentang Laporan Biro Administrasi Efek Sendiri. Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 317/BL/2008 tanggal 6 Agustus 2008*. Jakarta: Bapepam dan LK.
- Bapepam dan LK. 2012. *Peraturan Bapepam –LK Nomor : X.K.6 lampiran keputusan Nomor : Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik*. Jakarta: Bapepam dan LK.
- Benefita. 2011. *PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan)*. [online]. <http://www.benefita.com/view.htm>. [21 september 2012].
- Chariri, A. 2008. Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*.
- Diba, Farah. 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Laporan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Laporan Tahunan Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

- Dwi K., Noviyanti. 2012. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Jember : Universitas Jember.
- Faizal. 2004. Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme Corporate Governance. *Simposium Nasional Akuntansi VII. Ikatan Akuntansi Indonesia*.
- Fransiska, Riski. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Laporan Tahunan*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Versi 19*. Semarang: Badan Penerbit UnDip.
- Hapsoro, Dody. 2007. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Transparansi: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol 18, No. 2, Agustus 2007.
- Hasan, Zaini, M.. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. PPS UM.
- Hariyanto, E. 2009. Environmental Disclosure dalam Laporan Tahunan. *Jurnal Akuntansi*, 4 (2) : 1-12.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, N., dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Indrayani, D. 2009. Analisis Hubungan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan PERSERO dan Perusahaan Perbankan Umum Swasta Nasional Go Public Periode 2007-2008. *Jurnal Universitas Gunadarma*.